

Judul : APBN Harus Sejahterakan Nelayan Kecil
Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

APBN Harus Sejahterakan Nelayan Kecil



Puteri Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menekankan, APBN harus menjamin kesejahteraan kepada nelayan kecil. Hal ini sesuai komitmen Pemerintah dan DPR yang menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan kecil dan pengelolaan kawasan pesisir.

Perjuangan parlemen tercermin dengan ditetapkannya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2021.

Mengapa kita masukkan NTN, tujuannya karena kami ingin Pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan dari nelayan kecil yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

"Kami ingin melihat sejauh mana keberpihakan Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan kecil. Dan untuk hal tersebut, diukurnya melalui NTN. Jadi, ketika Bu Menkeu menyampaikan laporan terkini realisasi APBN, kami bisa memantau capaian dari indikator tersebut," papar Puteri, kemarin.

Seperti diketahui, NTN merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Pada APBN 2022, Pemerintah dan DPR telah menetapkan NTN sebesar 104-106 dan sebesar 107-108 pada APBN 2023.

Menurutnya, indikator ini memang masih belum sempurna. Karena Kemenkeu sendiri menyadari bahwa selama ini berbagai bantuan yang dialirkan pemerintah kepada petani maupun nelayan belum tertangkap dalam pengukuran NTN dan NTP.

"Makanya, kemarin ketika Rapat bersama BPS, Bu Menkeu meminta untuk melakukan penyempurnaan dalam penghitungan NTP dan NTN, agar mampu mengukur dampak bantuan Pemerintah pada kesejahteraan petani dan nelayan," jelas Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini.

Lebih lanjut, Srikandi milenial Golkar ini juga mengungkapkan berbagai saluran anggaran dalam APBN yang dialokasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Antara lain, melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, Dana Bagi Hasil Perikanan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan, hingga Bantuan Sosial.

Kemudian ketika menghadapi dampak kenaikan harga BBM kemarin pun, APBN juga diarahkan untuk tetap melindungi daya beli bagi kelompok rentan, seperti petani dan nelayan melalui bantuan sosial.

Menurutnya, banyak sekali nelayan yang terpaksa harus berhenti melaut imbas kenaikan harga BBM. Pun ketika mereka memaksa pergi melaut, hasil tangkapannya tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. ■ KAL